

## AGROPOLITAN: SUATU KERANGKA BERPIKIR BARU DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL?

Iwan Nugroho

Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang

### ABSTRACT

*The study is aimed to comprehend Agropolitan framework in developing of national policy, and specifically its opportunity in East Java Province. Agropolitan is regional development that is based on broadly agricultural development in term on-farm, off-farm and the supporting sector. Until 2003, it has developed 29 agropolitan areas in each province excluding DKI Jakarta. Fund sharing contribution for the agropolitan development were (i) central government, 10 to 20 percent; (ii) province government, 21 to 40 percent; and (iii) regency or municipality government 41 to 60 percent. In East Java, Pasuruan and Sidoarjo regency were proposed as agropolitan area based on some reasons as follows: (i) perform significant entrepreneurship of human resources; (ii) in line with the development plan of Agribusiness Market Center in Jemundo Village, Sidoarjo Regency; and (iii) provide a high access to Tanjung Perak harbor and Juanda International Airport. Both regency areas have resulted leading commodities such as estate plant (mangoes, apple, sugarcane), fisheries (bandeng), horticulture (high altitude vegetables), livestock (cow-milk and poultry), and wood craft and mebellair (from forest product).*

**Keywords:** Agropolitan, East Java, Pasuruan-Sidoarjo, leading commodity

### A. LATAR BELAKANG

Istilah agropolitan telah mengemuka dalam tataran konsep atau teori maupun implementasi kebijakan. Dalam tataran konsep, orang mencoba mencari asal-muasal dari mana agropolitan dapat didekati dengan konsep yang telah ada. Sementara ini ditemukan, bahwa agropolitan adalah hasil pendekatan terhadap teori-teori pembangunan yang berbasis pada sektor pertanian, atau pembangunan wilayah pertanian. Pengambil keputusan kemudian menarik benang merahnya secara langsung kepada implementasi kebijakan pembangunan. Bila dilihat bahwa suatu wilayah memiliki karakteristik sosial, ekonomi dan lingkungan dari sektor pertanian secara signifikan, seorang perencana dapat mengusulkan suatu kebijakan pembangunan agropolitan.

Perjalanan pembangunan yang dilandasi konsep agropolitan membuka wacana yang menantang. Program-program pembangunan desa dan pertanian yang telah berjalan dapat dipandang sebagai pembangunan agropolitan, antara lain Koperasi Unit Desa (KUD), dan Kredit Usaha Tani (KUT), dan Listrik Masuk Desa. Namun program Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET), yang melibatkan 13 propinsi luar Jawa dianggap lebih sejalan dengan konsep agropolitan. KAPET lebih berorientasi pada karakteristik wilayah dimana pertanian menjadi basis ekonomi. Hal ini memungkinkan terjadinya perencanaan, koordinasi, dan integrasi antar wilayah untuk menghasilkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Implementasi kebijakan pengembangan agropolitan telah mencapai hingga 29 propinsi pada tahun 2003. Istilah agropolitan yang awalnya belum dipahami sepenuhnya, akhirnya terimplementasikan secara baik pada setiap propinsi. Perilaku dan kaitan ekonomi atas dasar komoditi,

telah mampu ditelaah secara baik sehingga dapat menghasilkan pengembangan wilayah agropolitan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan sektor pertanian dengan didukung infrastruktur dan penunjangnya pada gilirannya dapat menghasilkan struktur ekonomi yang lebih dinamis pada wilayah agropolitan.

Tulisan ini mencoba menelaah kerangka berpikir pembangunan agropolitan di dalam kebijakan pembangunan nasional. Telaah dilengkapi dengan gagasan pengembangan wilayah agropolitan di propinsi Jawa Timur.

## **B. KAJIAN TEORITIS**

Perkembangan dan sejarah konsep pembangunan wilayah mengalami perubahan yang dinamis. **Pertama**, dimulai dengan konsep teori *central place* dari Christaller pada tahun 1933. Konsep ini bertujuan ingin menjelaskan pilihan-pilihan lokasi untuk sektor-sektor publik dan pribadi, serta dimana posisi pemerintah mengambil keputusan sehingga menghasilkan alokasi yang optimal bagi berbagai fungsi layanan ekonomi. **Kedua**, konsep neoklasik. Konsep ini menyatakan bahwa penggunaan sumberdaya dapat menjadi optimum dan distribusi pendapatan dan pertumbuhan antar wilayah akan merata apabila mekanisme pasar berfungsi sebagaimana mestinya. **Ketiga**, teori *growth pole*. Konsep ini berkembang di Perancis pada tahun 1950 dimana suatu industri tertentu perlu dikembangkan dengan berbagai fasilitas pendukungnya sehingga menstimulasi berbagai aktifitas ekonomi di wilayah sekitarnya. **Keempat**, teori *export base*. Teori berkembang di Amerika Serikat pada awal dekade lima puluhan, dimana pertumbuhan wilayah dipicu oleh permintaan eksternal. Selanjutnya pendapatan yang diterima dari ekspor digunakan untuk menstimulasi permintaan internal dan pertumbuhan wilayah. **Kelima**, *centre-periphery-models*. Model dicetuskan oleh Gunnar Myrdal pada tahun 1957 sebagai pertanyaan terhadap penerapan model neoklasik di negara berkembang. Myrdal mengatakan bahwa negara berkembang tidak mungkin berdampingan dengan negara maju dalam kerangka mekanisme pasar, karena akan menghasilkan kesenjangan yang makin parah. Model Myrdal baru diakui pada awal tujuh puluhan sebagai paradigma baru pembangunan. Myrdal menginginkan feri-feri harus memperoleh perhatian yang proporsional agar kesenjangan dapat dihentikan.

Konsep pembangunan agropolitan diangkat dari pemikiran Myrdal dalam konteks yang lebih spesifik, yakni keadaan negara-negara Asia yang umumnya berpenduduk padat, serta sistem pertaniannya labor intensive dalam skala usaha kecil. Friedmann and Douglas (1978) dalam Mercado (2002) mengimplementasikan gagasan Myrdal ke dalam konsep pembangunan **agropolitan**. Agropolitan merupakan pendekatan perencanaan pembangunan tipe bottom-up yang berkeinginan mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan lebih cepat dibanding strategi growth pole. Karakteristik agropolitan meliputi (i) *skala geografi relatif kecil*, (ii) *proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang bersifat otonom dan mandiri berdasarkan partisipasi masyarakat lokal*, (iii) *diversifikasi tenaga kerja pedesaan pada sektor pertanian dan non pertanian, menekankan kepada pertumbuhan industri kecil* (iv) *adanya hubungan fungsional industri pedesaan - perkotaan dan linkages dengan sumberdaya ekonomi lokal*, dan (v) *pemanfaatan dan peningkatan kemampuan sumberdaya dan teknologi lokal*. Selanjutnya Friedmann and Weaver (1979) menyempurnakannya sebagai strategi pembangunan wilayah (pedesaan maupun perkotaan) yang bertumpu pada sumberdaya lokal dengan dukungan implementasi dalam aspek politik, ekonomi dan sosial, untuk mencapai sasaran (i) *diversifikasi aktifitas ekonomi*, (ii) *mendorong ekspansi pasar regional (bahkan dengan substitusi impor)*, (iii) *mendorong perputaran modal (recirculation) di dalam masyarakat*, dan (iv) *mendorong proses pembelajaran*.

Friedmann dalam Syahrani (2001), menyatakan bahwa di dalam wilayah agropolitan disediakan berbagai fungsi layanan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan agribisnis. Fasilitas pelayanan meliputi sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi). Dalam konsep agropolitan juga diperkenalkan adanya agropolitan distrik, yakni suatu

daerah pedesaan dengan radius pelayanan 5 hingga 10 km dan dengan jumlah penduduk 50 hingga 150 ribu jiwa serta kepadatan minimal 200 jiwa per km<sup>2</sup>. Jasa-jasa dan pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat.

Sekalipun konsep Friedmann dan kawan-kawan dapat dianggap sebagai definisi baku, namun muncul pula tafsiran, varian atau yang berdekatan dengan definisi agropolitan. Misalnya, model *selective spatial closure*. Model ini menjelaskan bahwa pembangunan dapat dilakukan secara selektif terhadap wilayah-wilayah tertentu dan dengan alasan tertentu pula. Misalnya industri pada wilayah feri-feri dapat diberi perhatian, atau harus dilindungi dari kompetisi dengan industri yang sama di wilayah center. Oleh sebab itu infrastruktur lokal harus diperkuat sebagai antisipasi dari dampak ekonomi yang lebih global. Kebijakan diarahkan secara spesifik kepada pemenuhan kebutuhan dasar dari masyarakat lokal dalam memproduksi (*basic need and target group-oriented*) bukan dengan pendekatan teknis untuk masyarakat secara umum. Model lain sebagai bagian dari agropolitan adalah yang disebut dengan *locally integrated economic circuit* atau (LIEC), yakni sistem ekonomi wilayah lokal yang terdiversifikasi dan terintegrasi, mandiri, dinamis, didominasi aktifitas ekonomi skala usaha kecil, yang menjalankan proses alokasi sumberdaya secara harmonis dan berkesinambungan. Model LIEC menuntut pendefinisian batasan wilayah yang relevan, potensi sumberdaya wilayah, kapasitas industri, teknologi lokal tepat guna, dan dukungan kelembagaan. Konsep lainnya adalah apa yang disebut dengan *Sustainable Integrated Planning* (SIP). Pembangunan agropolitan menurut model SIP menjelaskan sisi-sisi praktis dari implementasi pembangunan berkelanjutan. Dalam pandangan SIP, pembangunan dapat dilaksanakan jika landasan perencanaan dicukupi. Perencanaan menjadi panduan pelaksanaan pembangunan pada semua level, nasional, provinsi dan wilayah.

Menurut Scrimgeour, Chen and Hughes (2002), pembangunan agropolitan yang disebutnya sebagai *self-centred development*<sup>1</sup> memerlukan intervensi pemerintah dalam bentuk regulasi untuk memotong hambatan-hambatan struktural. Upaya tersebut bertujuan agar terjadi integrasi sosial ekonomi di dalam wilayah dengan budaya, sumberdaya, lansekap dan iklim tertentu. Lebih jauh, kebutuhan investasinya dapat didatangkan dari luar wilayah jika kemampuan lokal relatif rendah. Dengan kata lain, alokasi sumberdaya wilayah merupakan komponen penting pembangunan agropolitan bersama-sama dengan aspek ekologi dan sosial.

Secara umum pendekatan dari pembangunan agropolitan telah dapat diterima. Berbagai negara sudah menerapkan sekalipun dengan istilah yang beragam. Pemerintah Cina menerapkannya dalam istilah *walking on the legs*. Satu kaki berpijak kepada kebijakan untuk mendorong pertumbuhan dengan mengandalkan industri skala besar, sementara kaki lainnya menerapkan konsep agropolitan untuk mengembangkan aktifitas ekonomi wilayah lokal. Sementara Afrika Selatan menerapkan kebijakan *Growth with Equity and Redistribution* (GEAR) pada tahun 1996 (Simon, 2000). Demikian pula, pendekatan ini juga telah menjadi program baku Bank Dunia di dalam kerangka *community base development* untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan (usaha kecil), atau pengembangan kredit mikro.

Definisi baku mengenai pembangunan agropolitan di Indonesia belum jelas dinyatakan. Menurut Depkimpraswil<sup>1</sup>, program agropolitan mengandung pengertian pengembangan suatu wilayah tertentu yang berbasis pada pertanian. Depkimpraswil memiliki kepentingan dalam penyediaan sarana dan prasarana wilayah sementara Deptan bertanggungjawab terhadap aspek produksi pertanian. Sementara itu pemerintah kabupaten Kutai Timur<sup>2</sup> mendefinisikan Agropolitan sebagai sistem manajemen dan tatanan terhadap suatu wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan bagi kegiatan ekonomi berbasis pertanian (agribisnis/agroindustri). Wilayah agropolitan diharapkan akan menarik pengembangan ekonomi berbasis agri di wilayah hinterland, dan oleh karenanya perlu diciptakan suatu Linkage dan keterpaduan antara kawasan Agropolitan dengan kawasan hinterland.

---

<sup>1</sup> [www.kbw.go.id/agropolitan.htm](http://www.kbw.go.id/agropolitan.htm)

<sup>2</sup> [www.kutaitimur.go.id/web/agropolitan.htm](http://www.kutaitimur.go.id/web/agropolitan.htm)

---

---

### C. PEMBANGUNAN AGROPOLITAN DI INDONESIA

Perjalanan pembangunan agropolitan di Indonesia dapat dikatakan relatif baru. Namun demikian apabila dilihat dari tujuan dan sarasannya barangkali sudah banyak dikemukakan dengan istilah atau program yang lain yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan agropolitan (Syahrani, 2001). Pada awal orde baru, pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dapat dipandang sebagai upaya peningkatan aktifitas ekonomi di wilayah pedesaan melalui penyediaan sarana produksi (Saprodi) maupun menampung hasil panen. Pada saat yang sama program pelayanan kesehatan (Puskesmas), Listrik Masuk Desa, dan pembangunan infrastruktur jalan merupakan faktor pendukungnya. Wilayah-wilayah tersebut sekarang telah berkembang menjadi beberapa kota-kota besar. Dengan berjalannya waktu, konsep agropolitan juga berkembang untuk sasaran yang spesifik. Untuk pemerataan kepadatan penduduk dijalankan program transmigrasi. Untuk mempercepat ketertinggalan beberapa propinsi di tanah air, dicetuskan program Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET). Untuk mendorong keunggulan komparatif dikeluarkan program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP). Untuk mempersiapkan perdagangan bebas dicetuskan program pengembangan wilayah perbatasan (misalnya Singapura-Johor-Riau, SIJORI). Menurut Syahrani (2001), konsep agropolitan distrik dari Friedmann telah terbentuk sebagai pusat-pusat pelayanan di wilayah pedesaan. Hal tersebut dicirikan dengan adanya pasar-pasar untuk pelayanan masyarakat pedesaan. Mengingat volume permintaan dan penawaran yang masih terbatas dan jenisnya berbeda, maka telah tumbuh pasar mingguan untuk jenis komoditi yang berbeda. Di Jawa, pusat-pusat pelayanan tersebut dikenal dengan nama pasar *Pahing*, *Pon*, *Wage* atau *Kliwon*, sedangkan di Jakarta dikenal dengan nama pasar *Minggu*, *Senen*, *Rebo*, dan *Jum'at*.

Program pembangunan agropolitan dalam arti yang sesungguhnya (dan terencana) dimulai pada tahun 2002 melibatkan berbagai sektor di delapan provinsi, yakni : (i) Kabupaten Agam (Sumatera Barat); (ii) Kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu); (iii) Kabupaten Cianjur (Jawa Barat); (iv) Kabupaten Kulon Progo (D.I. Yogyakarta); (v) Kabupaten Bangli (Bali); (vi) Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan); (vii) Kabupaten Boalemo (Gorontalo); (viii) Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur). Basis pertanian dalam program pembangunan agropolitan mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Pada tahun 2003, program lebih diperluas lagi karena yang memiliki nilai strategis hingga mencapai 29 provinsi di luar DKI Jakarta (Tabel 1). Setiap propinsi mengembangkan 1 (satu) wilayah agropolitan yang spesifik dengan keunggulan lokasinya. Untuk mendukung program ini, Depkimpraswil telah mengalokasikan dananya minimal Rp. 1,5 milyar untuk setiap wilayah. Pada Pertemuan Tingkat Nasional pada tanggal 6 Pebruari 2003 di Jakarta, untuk Sinkronisasi Program antara Pusat – Daerah mendukung pembangunan Agropolitan, berhasil disepakati adanya kontribusi pendanaan (*Fund Sharing*), yang mengacu pada Ketetapan Menteri Pertanian, yaitu: (a) Pemerintah Pusat, mendanai antara 10 hingga 20 persen; (b) Pemerintah Provinsi, mendanai antara 21 hingga 40 persen; (c) Pemerintah Kabupaten, mendanai antara 41 hingga 60 persen, dari seluruh biaya program agropolitan pada wilayah tertentu.

**Tabel 1. Wilayah Agropolitan di Indonesia**

No	Propinsi	Kota/Kab Agropolitan	Komoditi/Basis Agribisnis
1	Sumatera Barat	Agam	Sapi
2	Bengkulu	Rejang Lebong	jagung, sayuran
3	Jawa Barat	Cianjur	Sayuran, Bunga-bunga
4	DI Yogyakarta	Kulon Progo	Biofarmaka
5	Bali	Bangli	Kopi, Jeruk
6	Sulawesi Selatan	Barru	Sapi
7	Gorontalo	Boalemo	Jagung
8	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Coklat, jagung
9	NAD Aceh	Aceh Besar	Sapi
10	Sumatera Utara	Tapanuli Utara, Simalungun, Toba Samosir, Dairi, dan Karo	Sayuran
11	Lampung	Lampung Tengah	Padi, jagung, kedele
12	Babel	Belitung	Manggis, lada
13	Riau	Indragiri Hilir	Kelapa, padi
14	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Kedele, sapi potong
15	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir (OKI), Ulu (OKU)	Padi, hortikultura
16	Banten	Pabdeglang	Palawija, durian
17	Jawa Barat	Kuningan	Sapi
18	Jawa Tengah	Semarang, Pemalang	Tanaman hias, farmaka, sapi
19	Jawa Timur	Mojokerto, Banyuwangi	Palawija
20	Bali	Tabanan	Petemakan
21	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Sapi
22	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sapi
23	Sulawesi Utara	Minahasa	Kentang, wortel, sayuran
24	Sulawesi Tengah	Donggala	kakao, sapi, ikan
25	Sulawesi Tenggara	Kendari	sapi
26	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Jeruk, sayuran
27	Kalimantan Tengah	Kapuas	Sapi
28	Kalimantan Barat	Pontianak	Lidah buaya, pepaya, sayuran
29	Papua	Jayapura	Kakao

Sumber: [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id)

Pentingnya keterpaduan semakin memperluas cakupan wilayah agropolitan. Propinsi Sumatera Utara mengembangkan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan (KADTBB) yang terdiri lima Kabupaten. Keterkaitannya yang sangat erat dengan daerah dataran medium dan rendah dalam sistem agribisnis, sehingga menghasilkan hubungan antar wilayah tidak dapat dipisahkan sama sekali. Total luas KADTBB mencapai 19.162,25 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 79 kecamatan, mencakup kabupaten-kabupaten Tapanuli Utara (6.062 km<sup>2</sup>), Simalungun (4387 km<sup>2</sup>), Toba Samosir (3441 km<sup>2</sup>), Dairi (3146 km<sup>2</sup>), dan Karo (2127 km<sup>2</sup>). Wilayah agropolitan provinsi Sumatera Selatan juga melibatkan dua kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu (OKU).

Wilayah agropolitan Kabupaten Kutai Timur, propinsi Kalimantan Timur telah memiliki konsep pembangunan agropolitan yang cukup baik<sup>3</sup>, yang diberi nama Agropolitan Sangsaka (singkatan dari Sangkulirang, Sangata dan Kaliurang, nama wilayah di kabupaten tersebut). Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi:

- a. Menetapkan batasan wilayah Agropolitan Sangsaka, dimana Maloy sebagai pusat Agroindustri dan pusat pertumbuhan.
- b. Melakukan zonasi komoditas di kabupaten Kutai Timur dan menetapkan wilayah- pengembangan lain yang berfungsi sebagai satelit pertumbuhan dari Agropolitan Sangsaka atau pusat pertumbuhan Agribisnis orde kedua.
- c. Mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, komunikasi, air bersih dan energi bagi wilayah agropolitan maupun pengembangan agribisnis di wilayah pendukungnya.

<sup>3</sup> [www.kutaitimur.go.id/web/agropolitan.htm](http://www.kutaitimur.go.id/web/agropolitan.htm)

- Faktor-faktor pendukung pembangunan Agropolitan Sangsaka, meliputi
- Luas wilayah Sangsaka mencukupi sebagai pengembangan agropolitan, yakni sedikitnya 25 ribu hektar.
  - Pelabuhan samudra dengan kapasitas bongkar muat 7000 ton, dan dapat menjadi pelabuhan transit ke Indonesia Timur.
  - Jalan Arteri (trans Kalimantan) Sangatta-Samarinda-Balikpapan
  - Jumlah populasi penduduk SangSaKa sekitar 300.000 jiwa
  - Kondisi agroklimat sangat sesuai untuk pengembangan komoditas agribisnis
  - Fasilitas sarana-prasarana dan terus dikembangkan
  - Peraturan penggunaan ruang secara rinci (RDTR, RTBL, dll) di Maloy
  - Pola pengembangan perkebunan yang khas di Kutai Timur dan Maloy
  - Sumberdaya manusia yang mendukung, misalnya Dai Pembangunan, PPL, Petani inti dan kader koperasi
  - Pembentukan Koperasi Unggul di kecamatan
  - Tersedianya Angkutan Pedesaan
  - Maloy telah disetujui sebagai salah satu kawasan tumbuh di Kalimantan Timur

Pengembangan agropolitan sebagaimana pengalaman kabupaten Kutai Timur, memerlukan serangkaian persiapan dan langkah-langkah teknis yang rinci. Peran pemerintah menjadi syarat mutlak untuk mendayagunakan seluruh sumberdaya wilayah agropolitan. Departemen Pertanian telah berupaya memformulasikan peran pemerintah (kabupaten, provinsi dan pusat) dalam berbagai kegiatan mulai dari landasan aturan, mekanisme pembinaan, pengelolaan informasi hingga monitoring dan evaluasi (Tabel 2).

**Tabel 2. Peran Pemerintah dalam Program Agropolitan**

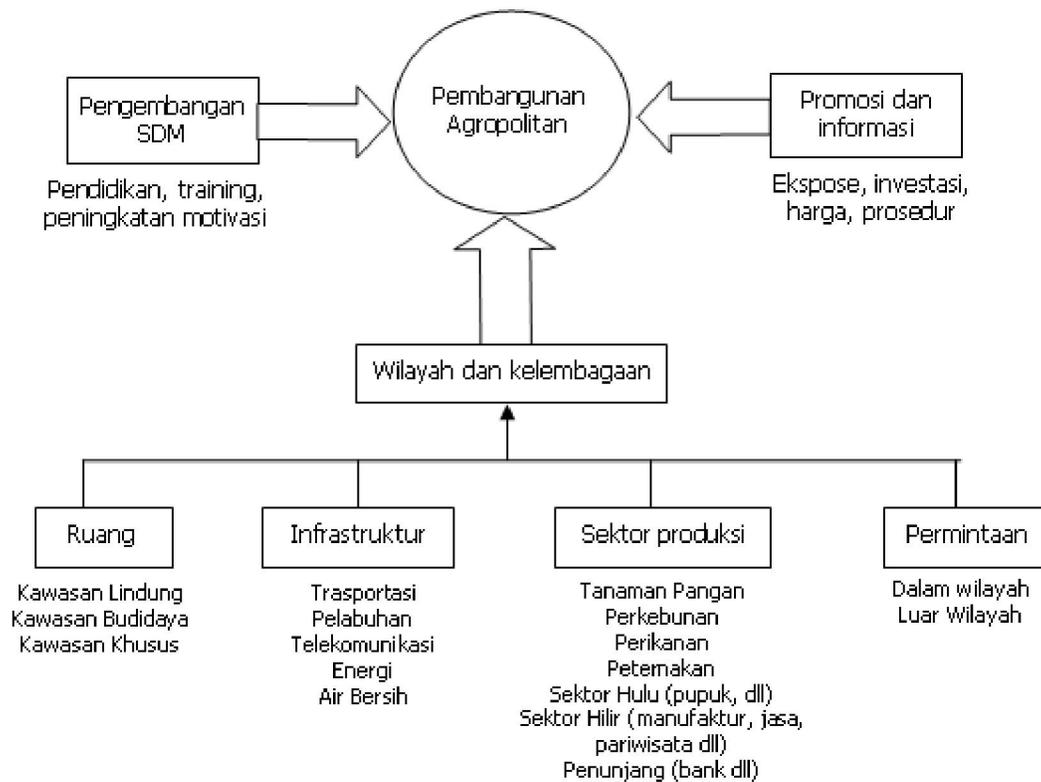
No	Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten/ kota	Provinsi	Pusat
1	Landasan aturan			
	▪ Petunjuk Teknis/Petunjuk Praktis	√		
	▪ Petunjuk Teknis		√	
	▪ Modul/Model Program			√
2	Sosialisasi / Apresiasi ke Aparat dan masyarakat	√	√	√
3	Survey identifikasi dan penyusunan/pemantapan Master Plan Kawasan	√		
4	Pelatihan Manajemen Program Agropolitan	√	√	
5	Pendidikan dan Latihan			
	▪ Pemberdayaan bagi petani pelaku agribisnis di pedesaan	√		
	▪ Penyuluh / Petugas	√	√	
	▪ KTNA/Tokoh-tokoh petani		√	
6	Percontohan usaha agribisnis (dapat dikaitkan pinjaman bantuan langsung masyarakat atau PBLM)	√		
7	Penguatan kelembagaan agribisnis pada level	√	√	
	▪ KTNA/P4S, BPP dan Badan/Unit Pengelola sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA)	√		
	▪ Asosiasi petani, forum petani, lembaga keuangan mikro (LKM), Pasar, pengolahan hasil		√	√
8	Prasarana dasar dan sarana (on farm dan off farm) sesuai kebutuhan prioritas master plan dan kesejahteraan social	√		
9	Studi Banding	√	√	√
10	Pengembangan model usaha		√	√
11	Penyebaran informasi dan pelayanan teknologi untuk KKA		√	√
12	Promosi dan temu usaha	√		
13	Monitoring dan evaluasi	√	√	√

Sumber: diolah dari [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id)

**D. KERANGKA BERPIKIR PEMBANGUNAN AGROPOLITAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun suatu kerangka berpikir (metodologi) bagi pembangunan agropolitan. Agropolitan merupakan konsep dan metodologi pembangunan yang terencana dan terintegrasi pada suatu wilayah tertentu yang berlandaskan kepada sektor pertanian dalam pengertian *on-farm* dan *off-farm* dan segala penunjangnya (hal ini diberi istilah sistem agribisnis), dengan sasaran untuk (i) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, (ii) meningkatkan pendapatan, (iii) memperbaiki distribusi pendapatan, (iv) meningkatkan aliran komoditi, barang, jasa dan modal (iv) memperbaiki dan memelihara kualitas sumberdaya alam dan lingkungan, serta (v) meningkatkan fungsi dan efektifitas kelembagaan pemerintah maupun sosial di dalam wilayah. Sektor-sektor pendukung agropolitan meliputi (i) infrastruktur fisik, seperti transportasi dan pelabuhan, telekomunikasi, listrik, air bersih dan energi, (ii) pendidikan, seperti universitas dan politeknik, (iii) sistem informasi, seperti informasi harga, pasar komoditi, atau pasar faktor produksi, dan (iv) kelembagaan pendukung, mencakup peran dan komitmen pemerintah, tata ruang wilayah, kebijakan dan prosedur yang mendasari aliran manfaat ekonomi. Seluruh sektor saling berinteraksi, dan masing-masing menghasilkan nilai tambah dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, program pembangunan wilayah agropolitan berhadapan dengan aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan, yang berikut ini disertai dengan peluang studi bagi pengembangannya:



**Gambar 1. Model Pembangunan Agropolitan**

**1. Aspek sosial**

Kelembagaan merupakan landasan bagi berbagai fungsi layanan dan aliran manfaat untuk mendukung pembangunan agropolitan (Gambar 1). Unsur penting di dalam kelembagaan (Williamson, 1995) adalah *mode of organization* dan *uncertainty*. *Mode of organization*, berhubungan dengan alternatif dalam sistem produksi antara lain membuat atau membeli (produk antara), menggunakan modal sendiri atau hutang (dalam pasar kredit), tingkat upah (dalam pasar tenaga kerja), dan dukungan

(de)regulasi (dalam privatisasi). Uncertainty berhubungan dengan resiko-resiko (*investment hazard*), yang menyertai kontrak termasuk pula *administration cost* (kompensasi dalam transaction cost), *demoralization cost* (korupsi dan rent seeker), dan beragam policy jangka pendek dan jangka panjang (seperti pajak, pricing policy, kuota, atau pembatasan lainnya) yang menyebabkan distorsi dan depresiasi aset. Lapangan studi untuk mendukung pengembangan kelembagaan ini sangat meluas mengikuti sistem produksi yang ada dalam wilayah agropolitan, yang difokuskan dalam analisis kebijakan (Tabel 3).

**Tabel 3. Pengembangan Agropolitan dalam Aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dan Pengembangannya**

Aspek	Penentu	Peluang studi
Sosial	Kelembagaan	Analisis kebijakan
	Sumberdaya manusia	Peningkatan kualitas SDM
	Pengelolaan promosi dan informasi	Penerapan SIM Agropolitan, on-line dengan info sejenis di wilayah lain
Ekonomi	Investasi	<i>Feasibility study</i> sektoral, analisis kebutuhan sarana dan prasaranan infrastruktur, analisis kebijakan
	Sektor dan hubungan antar sektor produksi	Peningkatan produktifitas, analisis keseimbangan umum pengembangan teknologi tepat guna, perbaikan manajemen dunia usaha, pembinaan industri kecil, pengembangan inkubator
	Permintaan	Analisis penawaran dan permintaan, pengembangan industri kecil
Lingkungan	Kawasan lindung	Daya dukung lingkungan, <i>willingness to pay</i> , <i>environmental valuation</i>
	Kawasan budidaya	Pewilayahan komoditi, klasifikasi kemampuan lahan, baku mutu lingkungan, program-program penghijauan, <i>law enforcement</i> , penyusunan tata ruang yang berbasis permintaan masyarakat, penetapan pusat pertumbuhan
	Kawasan khusus	Penyusunan tata ruang

Faktor lain dalam aspek sosial adalah sumberdaya manusia (SDM) dan pengelolaan informasi. Upaya pengembangan SDM mencakup pendidikan, pemberian pelatihan dan peningkatan motivasi pelaku ekonomi. Kualitas SDM sangat penting bagi pengelolaan informasi yang berbasis data on-line. Beragam info dapat disajikan secara jelas dan cepat tanpa menimbulkan tafsiran tertentu. Peluang lapangan studi meliputi upaya peningkatan kualitas SDM dan penerapan sistem informasi manajemen (SIM) agropolitan.

## 2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi agropolitan meliputi infrastruktur, sektor produksi dan permintaan. Infrastruktur pendukung mencakup transportasi, pelabuhan, telekomunikasi, energi dan air bersih. Infrastruktur dapat mengefisienkan aliran dan menekan resiko investasi. Sementara itu, sektor produksi mencakup keseluruhan sistem agribisnis, yakni *on-farm*, *off-farm* hulu dan hilir dan sektor penunjangnya. Permintaan terdiri dari aliran barang, jasa dan modal ke luar wilayah atau ekspor dan ke dalam atau impor. Interaksi dari seluruh sektor produksi dan permintaan menghasilkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Peluang studi meliputi peningkatan produktifitas, pengembangan teknologi tepat guna, *feasibility study* sektoral, perbaikan manajemen dunia usaha, analisis penawaran dan permintaan, analisis kebutuhan sarana dan prasaranan infrastruktur, analisis kebijakan, analisis keseimbangan umum, atau pengembangan industri kecil.

### 3. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan dicirikan oleh keberadaan kawasan lindung, budidaya dan khusus. Tiga jenis penggunaan lahan tersebut berfungsi sebagai tempat, penyedia input bagi sistem produksi dan asimilasi terhadap dampak buruk lingkungan. Ruang lingkup studi meliputi penyusunan tata ruang yang berbasis permintaan masyarakat, pewilayahan komoditi, studi daya dukung lingkungan, baku mutu lingkungan, *willingness to pay* terhadap komoditi lingkungan, program-program penghijauan, serta reward dan punishment dalam pelaksanaan aturan hukum.

### D. AGROPOLITAN DI JAWA TIMUR

Upaya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal di Jawa Timur memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif. Ada dua sasaran yang ingin dicapai dan saling berkaitan. *Pertama*, menyasikan pertumbuhan antar wilayah. Aktifitas ekonomi di semua wilayah menghasilkan dinamika ekonomi yang signifikan, yakni gerakan maupun aliran penduduk, informasi, barang dan jasa, investasi, dan keuntungan (*benefit*) dan kerugian (*cost*) yang proporsional. Seluruh potensi wilayah termanfaatkan diimbangi aliran kesejahteraan pada masing-masing wilayah. Tidak ada lagi divergensi *benefit* dan *cost* sebagai dampak pemusatan ekonomi yang berlebihan. Program pembangunan bidang transportasi jalan lintas selatan dan jembatan Suramadu menjadi sangat relevan untuk mencapai sasaran ini.

*Kedua*, menyasikan pertumbuhan antar sektor ekonomi. Sektor pertanian, manufaktur dan jasa perlu ditumbuhkan secara proporsional. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian menjadi titik kritikal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Dalam keadaan normal, seyogyanya ia tumbuh tidak kurang dari 3.5 persen; dan dibanding pertumbuhan ekonomi manufaktur tidak kurang dari 4 persen. Ada beberapa alasan yang mendasarinya:

- (i) Sektor pertanian masih memelihara sekitar 40 persen tenaga kerja atau menampung 17 juta jiwa. Mereka akan memperoleh kenaikan kesejahteraan bila pertumbuhan ekonomi pertanian sedikitnya dua persen di atas pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk rata-rata provinsi Jawa Timur sebesar 0.7 persen (Sensus 2000).
- (ii) Sektor pertanian menyimpan faktor-faktor non ekonomi (seperti kelembagaan, lingkungan dan budaya) yang memiliki manfaat dan perlu dipelihara keberlanjutannya. Untuk memelihara manfaat tersebut, memerlukan sinergi dengan sektor manufaktur dalam aspek spasial. Pengalaman ini sudah terjadi dalam konversi sawah (menjadi industri) khususnya di jalur Pantura Jawa Barat sehingga menghasilkan dampak sosial yang signifikan pada periode 1980 dan 1990an. Saat itu, pertumbuhan manufaktur mencapai sedikitnya 9 persen sementara sektor pertanian tumbuh kurang tiga persen. Jawa Timur patut bersyukur hal itu tidak terjadi (Dick, Fox and Mackie, 1997).
- (iii) Jawa Timur (atau di wilayah Indonesia manapun) memiliki sumberdaya ekonomi (investasi, sumberdaya alam, dan teknologi) terbatas namun dengan jumlah penduduk sangat tinggi. Alokasi sumberdaya ekonomi memerlukan kehati-hatian agar manfaatnya terdistribusi merata kepada 35 juta orang, khususnya 17 juta jiwa di sektor pertanian. Bandingkan dengan sumberdaya ekonomi Malaysia yang sebesar empat kali PDRB Jawa Timur namun hanya dibagi kepada 18 juta penduduk. Dengan kata lain penduduk Malaysia memperoleh kue kesejahteraan setara 8 kali dibanding penduduk Jawa Timur (sehingga ada *joke*: walaupun di Malaysia ada korupsi, namun masyarakatnya masih kebagian manfaat ekonomi)

Pengembangan agropolitan yang berkelanjutan di Jawa Timur seyogyanya mempertemukan aspek-aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Aspek lingkungan dan sosial terwakili oleh keadaan sistem produksi pertanian (*on-farm*) dan masyarakat pada sentra-sentra produksi pertanian. Kinerja dua aspek ini lumayan baik terbukti dengan dominasi produksi pertanian Jawa Timur di tingkat nasional. Data-data berikut sudah sangat umum diketahui. Jawa Timur secara umum memproduksi rata-rata 35 persen tanaman pangan dan hortikultura nasional. Komoditi perkebunan yang dominan meliputi tebu, kopi, kakao, dan tembakau. Komoditi perikanan darat dan laut juga signifikan. Propinsi

---

ini juga memiliki populasi unggas terbesar mencapai 45 persen nasional (data diperoleh dari [www.deptan.go.id](http://www.deptan.go.id)). Yang masih agak mengganggu adalah aspek ekonomi, yang dicerminkan oleh kinerja faktor-faktor *off-farm* dan penunjangnya. Wilayah agropolitan yang menampilkan sistem agribisnis akan menghasilkan aliran manfaat ekonomi untuk menjamin keberlanjutan. Hal tersebut ditandai dengan transformasi struktur ekonomi wilayah yakni kenaikan peran sektor manufaktur yang berbasis *on-farm*. Pada wilayah tersebut biasanya terjadi proses pembelajaran yang luar biasa pada masyarakat dalam hal berwirausaha (*entrepreneurship*). Masyarakat telah mampu mengapresiasi lembaga keuangan, proses pengolahan hasil dan mutu komoditi. Wilayah juga memiliki sarana infrastruktur jalan, pasar, transportasi, bank, telepon, air bersih, listrik dan prasarana umum lain. Pertanyaannya adalah dimana wilayah tersebut? Apakah hanya kabupaten Mojokerto dan Banyuwangi (Tabel 1), yang hanya berbasis agribisnis palawija.

Penulis mengajukan usulan wilayah tersebut adalah kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo. Sedikitnya ada tiga alasan yang mendasar. **Pertama**, keduanya menyajikan *share* PDRB sektor manufaktur wilayah kabupaten tertinggi (sekitar 40 persen, Tabel 4) di Jawa Timur (BPS, 2004), mencerminkan kesiapan SDMnya dalam berwirausaha. Mereka juga menyajikan angka PDRB per kapita wilayah kabupaten tertinggi selain Gresik. **Kedua**, wilayah kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo saling berdekatan sehingga menghasilkan sinergi wilayah pasar (Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2004). Hal ini makin relevan dengan akan dibangunnya Pasar Induk Agribisnis di Desa Jemundo, Kabupaten Sidoarjo (Pemprov Jatim, 2005). **Ketiga**, akses transportasi darat dan kedekatan dengan pelabuhan Tanjung Perak dan bandara Juanda menguntungkan sebagai terminal ekspor komoditi pertanian dari seluruh wilayah di Jatim (Tabel 5).

Adapun basis komoditi agropolitan kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo dapat diperluas sesuai keunggulannya. Komoditi dengan keunggulan komparatif (*locational advantage*) meliputi perkebunan (mangga, apel, tebu), perikanan (bandeng), horikultura (sayuran dataran tinggi) dan peternakan (susu) sapi dan unggas. Sementara komoditi dengan keunggulan kompetitif meliputi tanaman hias, kerajinan kayu dan mebel (dari hasil hutan). Dataran tinggi di kabupaten Pasuruan, yakni Nongkojajar, Puspo, dan Prigen telah menjadi tujuan investasi (lokal atau dari luar wilayah) untuk pengembangan komoditi pertanian komersial secara alamiah maupun dikaitkan dengan permintaan sektor pariwisata.

**Tabel 4. Jumlah Penduduk, PDRB, PDRB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2003**

No	Kabupaten/Kota	Penduduk	PDRB	Proporsi PDRB Sektoral			PDRB per kapita	Pertumbuhan ekonomi
				Pertanian	Manufaktur	Jasa dan lainnya		
		ribu jiwa	miliar rp	persen			juta rp	persen
	<b>Kabupaten</b>							
1	Pacitan	538	1711.4	49.15	0.62	50.23	3179	3.09
2	Ponorogo	872	2998.3	42.45	1.53	56.02	3439	3.86
3	Trenggalek	671	1794.6	39.54	0.82	59.64	2674	3.09
4	Tulungagung	967	5526.6	19.07	23.09	57.84	5718	3.76
5	Blitar	1111	3704.7	47.99	0.80	51.21	3335	3.93
6	Kediri	1475	6453.4	38.01	12.37	49.62	4376	3.63
7	Malang	2339	10155.6	35.94	8.52	55.54	4342	3.64
8	Lumajang	1000	4335.1	46.07	6.13	47.80	4337	3.67
9	Jember	2232	8600	39.34	5.24	55.42	3853	4.13
10	Banyuwangi	1540	7783.9	36.62	9.04	54.34	5055	3.70
11	Bondowoso	709	2742.5	48.91	2.99	48.10	3870	3.07
12	Situbondo	621	3332.2	44.15	5.23	50.62	5365	3.85
13	Probolinggo	1029	5489.4	46.15	11.28	42.57	5333	3.75
14	Pasuruan	1420	11860.5	20.63	36.99	42.38	8354	4.42
15	Sidoarjo	1682	21130.7	5.05	43.00	51.95	12561	4.23
16	Mojokerto	968	4991.5	22.92	16.80	60.28	5154	3.70
17	Jombang	1172	4436.1	37.02	8.11	54.87	3784	3.08

18	Nganjuk	1028	3380.9	36.67	3.56	59.77	3289	3.81
19	Madiun	657	2380	47.77	2.43	49.80	3623	3.90
20	Magetan	621	2753.8	51.04	2.49	46.47	4436	3.21
21	Ngawi	837	2989.6	46.82	2.34	50.84	3570	3.78
22	Bojonegoro	1213	3865.4	52.14	3.35	44.51	3187	3.76
23	Tuban	1077	7116.4	20.65	14.08	65.27	6607	4.20
24	Lamongan	1236	4235.3	53.45	0.55	46.00	3427	3.77
25	Gresik	1060	14655.5	11.86	45.93	42.21	13828	4.90
26	Bangkalan	886	2878.5	48.62	0.59	50.79	3249	3.31
27	Sampang	834	2964.3	57.90	0.48	41.62	3556	3.42
28	Pamekasan	740	2194.9	39.54	0.36	60.10	2965	3.52
29	Sumenep	1032	3833.9	46.75	5.72	47.53	3714	3.24
<b>Kota</b>								
71	Kediri	252	22411.7	0.36	78.13	21.51	88924	3.41
72	Blitar	123	1072.6	6.41	10.11	83.48	8696	3.99
73	Malang	768	9425	1.03	33.29	65.68	12279	3.85
74	Pobolinggo	200	2198.7	4.71	23.44	71.85	10980	4.46
75	Pasuruan	177	1438.9	6.94	13.16	79.90	8142	3.87
76	Mojokerto	112	1295.4	2.24	7.62	90.14	11567	3.96
77	Madiun	169	1729.8	2.08	18.58	79.34	10206	3.69
78	Surabaya	2660	53767.1	0.33	30.93	68.74	20210	4.93
79	Batu	177	746.7	16.70	6.73	76.57	4213	4.91
<i>Jawa Timur</i>		36206	254380.9	20.01	26.35	53.64	7026	3.41

Hadirnya agropolitan Pasuruan-Sidoarjo diyakini akan menstimulasi kawasan-kawasan andalan pertumbuhan yang ada. Arus informasi, teknologi, komoditi dan jasa pertanian mengalir lebih dinamik diimbangi aliran kesejahteraan khususnya kepada masyarakat petani. Pasar menjadi mudah diakses dan dipahami tanpa tafsir oleh petani maupun konsumen. Hadirnya Pasar Induk Agrobisnis di Desa Jemundo Kabupaten Sidoarjo akan menjadi sumber ide, acuan atau kerangka berpikir bagi sub-sub terminal agrobisnis di kabupaten-kabupaten yang selama ini berkembangnya kurang sistematis.

**Tabel 5.**  
**Analisis SWOT Wilayah Agropolitan Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo**

Agribisnis	Kekuatan	Kelemahan	Tantangan	Peluang
<b>Hulu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri alat/mesin</li> <li>▪ Industri pupuk, pestisida</li> <li>▪ Akses yang tinggi ke faktor-faktor produksi pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penggunaan input produksi belum optimal karena keterbatasan kepemilikan lahan</li> <li>▪ Teknologi tepat guna belum tersosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Skala ekonomi harus besar agar efisien</li> <li>▪ Teknologi tepat guna masih dapat dikembangkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar domestik masih besar</li> <li>▪ Pendanaan dari swasta atau luar negeri</li> </ul>
<b>On-farm</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra produksi ikan, pangan, tebu, mangga, hortikultura, kehutanan</li> <li>▪ Kesuburan tanah</li> <li>▪ Mutu bibit belum baik</li> <li>▪ Usaha tani intensif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dan mutu produksi belum optimal</li> <li>▪ Keterbatasan lahan</li> <li>▪ Harga berfluktuasi</li> <li>▪ Pola tanam belum teratur/optimal</li> <li>▪ Usaha tani perorangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lahan pertanian/ikan terancam konversi ke industri/pemukiman</li> <li>▪ Bersaing dg wilayah lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Program revitalisasi pertanian</li> <li>▪ Tujuan pasar banyak</li> <li>▪ Pendanaan dari swasta atau luar negeri</li> </ul>
<b>Hilir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Berkembang sektor manufaktur pangan olahan, kulit, mebel</li> <li>▪ Berkembang industri kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri kecil manajemen tradisional</li> <li>▪ Belum mampu ekspor langsung</li> <li>▪ Belum ada akses ke standar mutu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industri pengolahan memberikan nilai tambah tinggi</li> <li>▪ Bersaing dengan industri sejenis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar ekspor</li> <li>▪ Networking dengan pasar ekspor</li> <li>▪ Pendanaan dari swasta atau luar negeri</li> </ul>

<p><b>Penunjang</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Infrastruktur air bersih, listrik, telekomunikasi memadai</li> <li>▪ Akses ke Juanda Airport, Tanjung Perak, transportasi ke Surabaya, Yogyakarta, Bali, dan Malang lancar</li> <li>▪ Memiliki Pasuruan Industrial Estate Rembang</li> <li>▪ Sektor pariwisata telah berkembang</li> <li>▪ Dekat dengan perguruan tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transportasi masih sering macet</li> <li>▪ Fasilitas <i>cold storage</i> di pelabuhan ekspor perlu ditingkatkan</li> <li>▪ Sistem agribisnis belum terbentuk</li> <li>▪ Tingkat konsumsi domestik rendah</li> <li>▪ Manajemen Pariwisata msh lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Egoisme birokrasi/ wilayah</li> <li>▪ Tujuan wisata bersaing dengan Bali, Yogyakarta</li> <li>▪ Agrowisata</li> <li>▪ Ecotourism Taman nasional Bromo, Tengger, Semeru belum optimal</li> <li>▪ Hasil-hasil riset/kajian perguruan tinggi belum dimanfaatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar Ekspor</li> <li>▪ Pendanaan dari swasta atau luar negeri</li> <li>▪ Networking dg tujuan wisata</li> <li>▪ Investor</li> <li>▪ pengembangan jalan</li> <li>▪ Otonomi daerah</li> <li>▪ Pasar Induk Agribisnis di Desa Jemundo Kabupaten Sidoarjo segera dibangun</li> <li>▪ Kerjasama dengan perguruan tinggi</li> </ul>
-------------------------	--	--	--	---

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konsep agropolitan saat ini merupakan paradigma pembangunan yang terintegrasi pada suatu wilayah tertentu yang berbasis sektor pertanian dalam pengertian on-farm dan off-farm dan segala penunjangnya. Dalam implementasinya, wilayah agropolitan hendaknya mengidentifikasi faktor-faktor ekonomi, lingkungan dan sosial untuk membentuk (i) pertumbuhan ekonomi wilayah; (ii) kenaikan pendapatan; (iii) perbaikan distribusi pendapatan; (iv) peningkatan aliran komoditi, barang, jasa dan modal; (iv) peningkatan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan; serta (v) perbaikan fungsi dan efektifitas kelembagaan pemerintah maupun sosial di dalam wilayah.

Program pembangunan agropolitan di Indonesia telah mencapai 29 provinsi yang masing-masing mengembangkan 1 (satu) wilayah agropolitan yang spesifik dengan keunggulannya. Di Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Sidoarjo merupakan wilayah agropolitan alternatif yang lebih menguntungkan dibanding kabupaten Mojokerto dan Banyuwangi. Alasan yang mendasari adalah (i) memiliki SDM dengan kewirausahaan yang lebih baik; (ii) dekat dengan akan dibangunnya Pasar Induk Agribisnis di Desa Jemundo, Kabupaten Sidoarjo; dan (iii) memiliki akses ke pelabuhan Tanjung Perak dan bandara Juanda. Komoditi unggulan dua wilayah tersebut meliputi perkebunan (mangga, apel, tebu), perikanan (bandeng), horikultura (sayuran dataran tinggi) dan peternakan (susu) sapi dan unggas, tanaman hias, kerajinan kayu dan mebel (dari hasil hutan).

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2004. *PDRB Kota dan kabupaten Se Jawa Timur*. BPS Jatim, Surabaya.
- Dick, H., J. J. Fox and J. Mackie (eds.). *Balanced Development: East Java in new order*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 500p.
- Friedmann, J. and C. Weaver 1979(1980). *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning* University of California Press, Berkeley. <http://www.upa.pdx.edu/IMS/about/staffpdfs/RegionalPlanningBib.pdf>. [12 Februari 2004]
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Penerbit PT Pustaka LP3ES Jakarta
- Mecardo, R. G. 2000. *A Review of Experience, State of the Art and Agenda for Research And Action*. Philippine Institute for Development Studies Discussion Paper Series NO. 2002-03

- Pemprov Jawa Timur. 2005. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008*. Draf.
- Scrimgeour, F., Hui-Chin Chen, and W. Hughes. 2002. *Regional Economic Development: What Does The Literature Say?* Department of Economics, Waikato University
- Simon, D. 2000. *Contextualising South African Local Economic Development In Current Development Debates: The International Setting*. Paper Prepared For The Conference On Local Economic Development In Post-Apartheid South Africa. University Of Sussex, Brighton, 28-29 April 2000
- Syahrani, H.A.H. 2001. *Penerapan Agropolitan dan Agribisnis Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Frontir (Universitas Mulawarman). Nomor 33, Maret 2001
- Williamson, O. E. 1995. *The institutions and governance of economic development and reform*. Proceeding of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1994. IBRD-World Bank, Washington, DC. 171-197